

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, bulan November 2007, yang membahas beberapa kesepakatan antara lain Piagam ASEAN 2007, Perjanjian perdagangan dalam kerangka kerjasama ekonomi, Penandatanganan kerjasama ASEAN dengan Korea *center*, Menyepakati ASEAN *center*.¹ Anggota negara ASEAN yang dihadiri oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand serta negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.² Negara – negara ASEAN ini membentuk adanya komunitas ASEAN. Komunitas yang dibentuk berguna untuk kemajuan dari negara – negara anggota ASEAN antara lain :³

1. Komunitas Masyarakat Politik – Keamanan ASEAN
2. Komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN
3. Komunitas Masyarakat Sosial – Budaya ASEAN

Salah satu pilar dari komunitas ASEAN tersebut ada yang mengatur tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / ASEAN Economic Community (AEC). Disepakati *Blueprint for the ASEAN Economic Community* yang akan digunakan sebagai peta kebijakan (*roadmap*) guna mentransformasikan negara ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. Didalam *AEC Blueprint* juga akan mendukung negara ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dengan tingkat

¹Devi, *Kerjasama KONTRAS dengan NGO-GO di ASEAN*, (ed), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm 78

²ASEAN 2015, *Menuju ASEAN Economic Community*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, hlm 2

³ ASEAN 2025 *Melangkah Maju Bersama*, hlm Kata Pengantar ii

pembangunan ekonomi yang merata serta kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang makin berkurang.⁴

Kerjasama AEC diberlakukan dari berbagai macam sektor yang dapat menguntungkan negara – negara ASEAN diberbagai macam barang komoditi dan jasa dari negara ASEAN yang akan bebas masuk tanpa adanya biaya impor pajak yang tinggi. Dengan adanya AEC, maka setiap warga negara ASEAN harus dapat bekerja sama dalam bidang ekonomi yang dapat saling menguntungkan negara – negara ASEAN yang bekerjasama.⁵

Terbentuknya AEC dan diterapkannya terhadap negara anggota ASEAN memiliki pilar – pilar dan konsep pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan dan penerapan negara – negara ASEAN, AEC memiliki perencanaan kerja yang tercantum didalam 4 pilar yaitu :⁶

- 1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas
- 2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*
- 3) ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara – negara Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam(CLMV) yang termuat dalam *initiative for ASEAN integration*
- 4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring global.

⁴Profil ASEAN <http://www.asean.org> Diakses 12 Oktober 2019

⁵Makalah MEA <https://rossanadewiap.wordpress.com> Diakses 12 Oktober 2019

⁶R.Winantyo dkk, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm 16

Keempat pilar AEC ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai kawasan dalam kerangka persaingan dengan kawasan/negara lain, maupun antar individu anggota. Kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara anggota harus diperkecil sehingga *playing field* antarnegara anggota menjadi setara. Hal ini diperlukan mengingat globalisasi dapat memperbesar kesenjangan pembangunan yang secara potensial dapat menciptakan kerenggangan dan memperlemah solidaritas ASEAN. Manfaat integrasi yang dirasakan oleh seluruh anggota akan menjamin integrasi ekonomi yang berkelanjutan.⁷

Keterkaitan keempat pilar AEC membutuhkan koordinasi, konsistensi dan kesatuan arah elemen – elemen dari setiap pilar, dimulai dari perencanaan sampai dengan tahap implementasi. Dalam menjamin hal tersebut maka keempat pilar perlu didukung oleh riset, *capacity building* dan efektivitas kelembagaan ASEAN, serta komitmen kuat tiap negara.⁸ Berdasarkan keempat pilar dalam AEC, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 11 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang didalamnya mengatur tentang dalam mengambil langkah – langkah untuk melaksanakan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Isi dari Inpres No 11 tahun 2011, antara lain :⁹

- a. Menuju pasar tunggal dan basis produksi
- b. Menuju wilayah ekonomi berdaya saing tinggi
- c. Menuju kawasan dengan pembangunan ekonomi yang seimbang.

Indonesia sendiri adalah salah satu negara terbesar populasinya yang ada di kawasan ASEAN. Masyarakat Indonesia adalah negara heterogen dengan berbagai jenis suku, bahasa, dan

⁷ Ibid, hlm 16

⁸ ibid

⁹Instruksi Presiden No 11 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN

adat istiadat yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi dunia (4,5%) setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India. Hal ini menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju AEC tahun 2015.¹⁰

Indonesia harus mampu meningkatkan kepercayaan diri bahwa sebetulnya Indonesia memiliki kekuatan untuk bisa bangkit dan terus menjaga kesinambungan stabilitas ekonomi yang sejak awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus meningkat, angka kemiskinan dapat ditekan seminim mungkin dan progres dalam bidang ekonomi lainnya pun mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Stabilitas ekonomi Indonesia yang kondusif merupakan sebuah *opportunity* dimana Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri apalagi sumber daya alam yang begitu besar.¹¹

Dalam *ASEAN Economic Community*, ASEAN harus melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan aturan – aturan serta patuh terhadap sistem berdasarkan aturan hukum yang mengatur agar pemenuhan dan implementasi komitmen – komitmen ekonomi dapat berjalan efektif.¹² Didalam *Blueprint ASEAN Economic Community 2025*, implementasi yang telah dicapai AEC 2015 secara substansi adalah penghapusan tarif dan fasilitasi perdagangan, pemajuan agenda liberalisasi perdagangan jasa, liberalisasi dan fasilitas investasi, penyederhanaan dan harmonisasi kerangka dan platform regulasi pasar modal, fasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil. Didalam *Blueprint AEC 2025* mengatur 12 sektor, antara lain 5 sektor berasal dari jasa pariwisata, kesehatan, logistik, penerbangan, komunikasi dan

¹⁰P Julius F, *Peluang dan Tantangan UKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Surabaya, 2008, hlm 5

¹¹Ibid

¹²Masyarakat Ekonomi ASEAN <https://kemlu.go.id> Diakses 15 Oktober 2019

informatika, *e-asean* dan 7 sektor berasal perdagangan dan industri pertanian, tekstil, elektronik, perikanan, karet dan kayu, otomotif serta mineral¹³

Hal itu menjadi suatu daya saing di Sumatera Barat dalam menghadapi AEC, untuk itu harus adanya pendorong dalam pertumbuhan dan peningkatan produksi komoditi barang dan jasa agar memiliki kualitas yang baik. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan keniscayaan mengingat saat ini tingkat pengangguran masih tinggi sementara Sumatera Barat memiliki potensi SDM.¹⁴

Dalam menghadapi AEC, daerah – daerah di Sumatera Barat yang bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk kerjasama yang dinamakan *sister city* artinya persetujuan kerja sama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Kemiripan tersebut misalnya kemiripan budaya, latar belakang sejarah, seperti halnya Bukittinggi dengan Seremban Negeri Sembilan Malaysia, kegiatan nyata dari kerjasama *sister city* di antaranya *sister city* Bukittinggi dan Seremban menjadi ajang diplomasi budaya dan kesenian, kepariwisataan, industri, kerjasama perdagangan, pendidikan dan kepemudaan.¹⁵ Kota Padang dengan kota Vung Tau di Vietnam juga melakukan kerjasama *sister city*, kedua kota ini memiliki kesamaan karakter dan kesetaraan antar kota yang secara geografis dan demografis serta kesamaan potensi daerah yaitu pada bidang perikanan, pertanian dan pariwisata.¹⁶

¹³ ASEAN 2025, op.cit, hlm 61

¹⁴ Padangmedia, *MEA Peluang Sekaligus Tantangan Sumbar harus Siap*, DPRD Sumbar, 2015

¹⁵ Wirani Fadhillah, *Kerjasama Sister City Bukittinggi Sumatera Barat Indonesia dengan Seremban Negeri Sembilan Malaysia 2011-2017*, Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm 2

¹⁶ Agra Sena Pranajaya, 2017, *Hambatan Kerjasama Luar Negeri Kota Padang Studi Kasus Sister City Kota Padang dengan Vung Tau*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm 4

Bagi Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sektor andalan dalam menjalankan *ASEAN Economic Community* ada tiga sektor, antara lain :

1. Sektor Pariwisata, kawasan utama pariwisata SUMBAR daerah pendukung nya adalah Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Jadi, mengembangkan kawasan tidak hanya padang, kalau bisa saling bersinergi. Sebab kalau misalnya WNA berwisata ke SUMBAR tentunya akan mencari objek wisata. Seperti contohnya di Kawasan wisata Mandeh Pesisir Selatan atau bisa juga Jam Gadang di Bukittinggi.
2. Sektor Tenaga Kerja, Sumatera Barat memanfaatkan lowongan kerja yang disediakan sejumlah negara, tenaga kerja asal Sumatera barat cenderung dikirim ke Negeri Jiran (Malaysia) untuk sektor manufaktur, harus diperluas aksesnya. dengan menempatkan tenaga kerja keluar negeri sangat bagus untuk mengurangi tenaga kerja di daerah.¹⁷ Buktinya pada tahun 2017 ada sebanyak 799 warga Padang yang diberangkatkan ke Malaysia jadi TKI. Tahun 2018 ada 903 orang serta untuk tahun 2019 bulan Januari hingga Maret sudah tercatat sebanyak 138 orang. Umur rata – rata yang menjadi TKI di Malaysia berkisar antara 18 tahun hingga maksimal 40 tahun.¹⁸
3. Sektor Ekonomi Kreatif, di Sumatera Barat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yang pertama, media desain yang terdiri dari iklan, percetakan, desain, animasi. Kedua, seni budaya yang terdiri dari seni pertunjukan, kerajinan, fashion, kuliner.¹⁹

¹⁷Peabri Anita Sari, *Tekan Angka Pengangguran, Pemprov SUMBAR Diminta Manfaatkan Lowongan Kerja Luar Negeri*, padangmedia.com , 2019

¹⁸Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Padang, www.bnp2tki.go.id Diakses 5 Desember 2019

¹⁹Republika.co.id, *Ribuan Pelaku Ekonomi Kreatif Sumbar butuh perhatian Pemerintah*, www.republika.co.id , 2015

Seperti Songket Silungkang yang tidak hanya dikenal oleh orang Indonesia saja tetapi sudah mencakup ke negara – negara lain dan juga rendang yang memang sudah diakui UNESCO.

Sejak adanya *ASEANEconomic Community* tahun 2015 kesiapan ASEAN cukup menjadi kecemasan bagi negara anggota ASEAN, karena pelaksanaan AEC berarti menciptakan perdagangan bebas yang artinya tidak ada hambatan (bea cukai) bagi negara – negara anggota ASEAN. Dengan terciptanya perdagangan bebas, bisa dipastikan tingkat persaingan negara – negara ASEAN meningkat. Bagi Indonesia sendiri dampak kesiapan dapat dilihat dari perbandingan aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekspor nasional serta pendapatan perkapita nasional masyarakat Indonesia dan juga terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang membutuhkan keahlian tertentu.²⁰

Dilaksanakannya *ASEANEconomic Community* tahun 2015 di Sumatera Barat pelaksanaan AEC ini tidak berjalan dengan lancar, oleh karena itu mudah – mudahan pemerintah Sumatera Barat dapat lebih memperkenalkan AEC kepada Masyarakat. Hal ini menjadikan suatu hal yang menarik sejauh manakah pelaksanaan *ASEANEconomic Community* di Sumatera Barat. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati, dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan kepada judul : **PELAKSANAAN ASEANECONOMIC COMMUNITY di SUMATERA BARAT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan beberapa perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah :

²⁰Atep Abdurofiq, *Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terhadap Pembangunan Indonesia*, www.academia.edu, 2015, hlm 4

1. Bagaimanakah pengaturan *ASEAN Economic Community* ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan *ASEAN Economic Community* di Sumatera Barat dan dampaknya yang ditimbulkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaturan *ASEAN Economic Community*
2. Menganalisa pelaksanaan *ASEAN Economic Community* di Sumatera Barat dan dampak yang ditimbulkan

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis/empiris, didasarkan pada data primer/data. Data primer/data dasar artinya data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan.²¹ Untuk hal itu penulis akan melaksanakan wawancara dengan :

1. Kepala Sub Bagian Ekonomi Bappeda Sumatera Barat
2. Kasi Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Sumatera Barat

b. Data Sekunder

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm 75

²²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 12

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip.²² Data sekunder yang digunakan terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari :
 - a) *ASEAN Economic Blueprint 2025*
 - b) *ASEAN Framework on Equitable Economic Development* (Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembangunan Ekonomi yang setara)
 - c) Intruksi Presiden No 6 tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
 - d) Intruksi Presiden No 11 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari jurnal dan laporan – laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini hanya akan menggambarkan tentang Pelaksanaan *ASEAN Economic Community* di Sumatera Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, antara lain :

- a. Wawancara artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan cara penanya membuat daftar pertanyaan yang semi terstruktur yang mana peneliti tidak menggunakan pertanyaan

yang spesifik, tapi hanya memuat poin – poin penting dari masalah yang ingin dicari tahu yang akan di jawab oleh narasumber.²³

- b. Studi dokumen artinya dengan mempelajari kepustakaan atau literatur – literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan penulis, yaitu kualitatif artinya dengan mengelompokkan data menurut aspek – aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka – angka.²⁵ Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara memberikan komentar – komentar dan tidak menggunakan angka – angka dan disajikan secara deskriptif analisis, yaitu hanya akan menggambarkan hasil dari penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu Pelaksanaan *ASEAN Economic Community* di Sumatera Barat.

²³Ibid, hlm 222-223

²⁴Ibid, hlm 209

²⁵Metthew B.Miles. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm 15-16